

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Kondisi Geografis Papua Barat



Sumber : *Badan Pusat Statistik, 2017*

Gambar 4.1

Peta Wilayah Provinsi Papua Barat

Berdasarkan gambar 4.1, Provinsi Papua Barat yang beribukotakan Kabupaten Manokwari, pada awalnya memiliki nama Irian Jaya Barat sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun

1999. Kemudian, berubah menjadi Papua Barat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 pada tanggal 18 April 2007. Setelah menjadi provinsi sendiri, Provinsi Papua Barat mendapat kekhususan seperti provinsi induknya (Provinsi Papua), yaitu memperoleh hak otonomi khusus sebagaimana yang tertera dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2008 perubahan atas Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua (KEMENKO POLHUKAM RI, 2011).

Otonomi oleh Provinsi Papua Barat, berarti pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintahan, dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi (Widjaja, 2002). Konsekuensi dari adanya kewenangan otonomi ialah pemerintah memiliki kewajiban untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan dan demokratis, adil, merata, dan memiliki keberlanjutan. Hal ini guna mencapai efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dalam pembangunan daerah.

Provinsi Papua Barat terletak di sebelah barat Pulau Papua, secara astronomis provinsi ini terletak pada pada $0^{\circ} - 4^{\circ}$ Lintang Selatan dan antara $124^{\circ} - 132^{\circ}$ Bujur Timur. Berada di bawah garis khatulistiwa dengan ketinggian 0-100 meter dari permukaan laut. Luas wilayah Papua Barat berupa daratan seluas $99.671,63 \text{ km}^2$.

Secara geografis, wilayah Provinsi Papua Barat bagian utara berbatasan dengan Samudera Pasifik, bagian timur berbatasan dengan

Provinsi Papua, bagian selatan berbatasan dengan Laut Banda, Provinsi Maluku, dan bagian barat berbatasan Laut Seram, Provinsi Maluku¹. Secara administratif, Provinsi Papua Barat terdiri dari 12 pemerintah kabupaten dan 1 pemerintah kota, 218 kecamatan, 95 kelurahan, dan 1742 desa, beserta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pemerintah kabupaten dan kota membawahi pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan. Pemerintah kabupaten/kota tersebut sebagai berikut:

1. Kabupaten Fakfak : Ibukota Fakfak
2. Kabupaten Kaimana : Ibukota Kaimana
3. Kabupaten Manokwari : Ibukota Manokwari
4. Kabupaten Manokwari Selatan : Ibukota Ransiki
5. Kabupaten Maybrat : Ibukota Kumurkek
6. Kabupaten Pegunungan Arfak : Ibukota Anggi
7. Kabupaten Raja Ampat : Ibukota Waisai
8. Kabupaten Sorong : Ibukota Aimas
9. Kabupaten Sorong Selatan : Ibukota Teminabuan
10. Kabupaten Tambora : Ibukota Fef
11. Kabupaten Teluk Bintuni : Ibukota Bintuni
12. Kabupaten Teluk Wondama : Ibukota Rasiei
13. Kota Sorong : Ibukota Sorong

¹ Badan Pusat Statistik, *Papua Barat dalam Angka 2017*, (Jakarta: BPS Provinsi Papua Barat), hlm 4

Tabel 4.1

Pembagian Wilayah Administrasi Provinsi Papua Barat Tahun 2017 (unit)

Kabupaten / Kota	2017	
	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan
Fakfak	17	149
Kaimana	7	86
Manokwari	9	173
Manokwari Selatan	6	57
Maybrat	24	260
Pegunungan Arfak	10	166
Raja Ampat	24	121
Sorong	30	252
Sorong Selatan	15	123
Tambraw	29	216
Teluk Bintuni	24	117
Teluk Wondama	13	76
Kota Sorong	10	41
Jumlah	252	1837

Sumber : *Papua Barat dalam Angka, 2013-2017 (data diolah)*

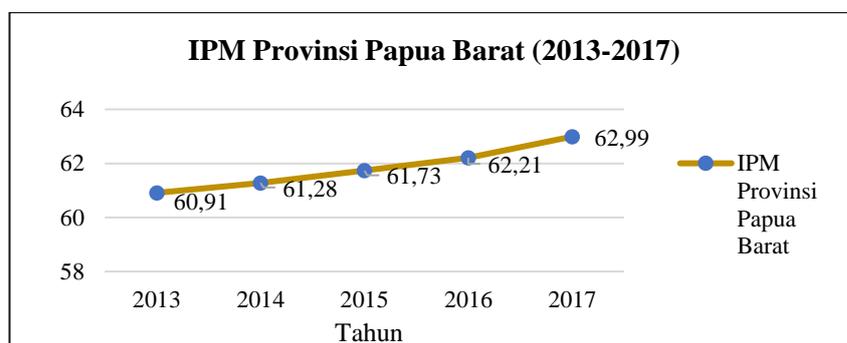
Berdasar tabel 4.1 diatas, dapat dilihat bahwa jumlah Kecamatan terbanyak terletak pada Kabupaten Sorong sebanyak 30 Kecamatan dan Desa/Kelurahan terbanyak terletak pada Kabupaten Maybrat dengan jumlah 260 Desa/Kelurahan unit pada tahun 2017. Sedangkan untuk jumlah Kecamatan paling sedikit adalah terletak pada Kabupaten Manokwari Selatan sebanyak 6 Kecamatan, dan Desa/Kelurahan paling sedikit terletak pada Kota Sorong dengan jumlah 41 Desa/Kelurahan unit pada tahun 2017.

B. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia merupakan sebuah proses dalam memperluas pilihan-pilihan bagi manusia. *United Nation of Development*

Programme (UNDP) melaporkan secara berkala Indeks Pembangunan Manusia dalam *Human Development Report* (HDR), bahwa setiap orang memiliki kebebasan dalam membuat pilihan sesuai keinginannya. Pembangunan Manusia merupakan sebuah proses sekaligus tujuan yang memiliki hasil, didalamnya warga harus terlibat dalam proses pembangunan juga ikut serta dalam memperbaiki proses guna meningkatkan kualitas hidup mereka (Berita Satu, 2017).

Indeks Pembangunan Manusia bertujuan memperluas pilihan-pilihan masyarakat guna mencapai sebuah kehidupan yang layak. Hal itu dilakukan dengan memberi kesempatan pada masyarakat dalam memperoleh peluang agar bisa meningkatkan kesehatan, pengetahuan, dan keterampilan sehingga pada saat yang sama hal tersebut dapat membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan dalam hidup mereka. Menurut Nurfitriani (2017), keberadaan Indeks Pembangunan Manusia menjadi strategis bagi pencapaian sebuah pembangunan di sebuah negara.



Sumber : BPS Provinsi Papua Barat, 2017 (data diolah)

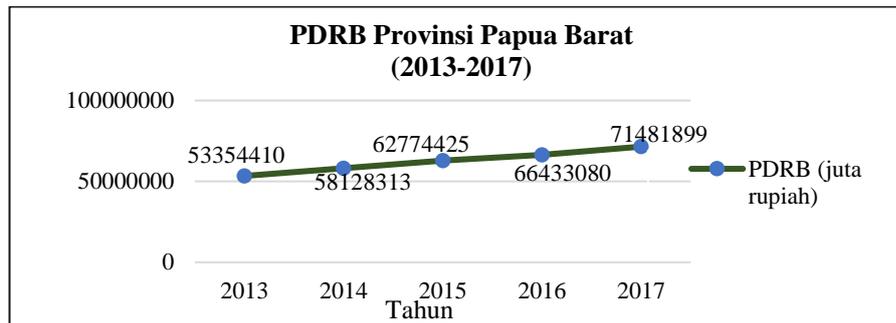
Gambar 4.2
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat, 2013-2017

Pada gambar 4.2, pencapaian Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua Barat pada kurun waktu tahun 2013 sampai 2017 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2013, IPM Provinsi Papua Barat berada posisi 60,91 poin, pada tahun 2014 meningkat menjadi 61,28 poin, kemudian di tahun 2015 berada di posisi 61,73 poin, pada tahun 2016 berada di posisi 62,21 poin, dan pada tahun 2017 meningkat di posisi 62,99. Kenaikan nilai IPM di Provinsi Papua Barat tiap tahunnya terjadi atas meningkatnya komponen-komponen penyusunnya, selain daripada itu juga hal ini dapat terjadi oleh adanya peranan masyarakat dan pemerintah dalam mengoptimalkan sasaran pembangunan pemerintah.

C. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan sebuah kemampuan suatu daerah dalam menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Penyusunan PDRB menggunakan dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan lapangan usaha (produksi) dan pendekatan pengeluaran (penggunaan) (Bank Indonesia, 2018).

Keduanya menampilkan formasi data nilai tambah pada suatu kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi lapangan usaha menunjukkan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjabarkan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.



Sumber : *BPS Provinsi Papua Barat, 2017 (data diolah)*

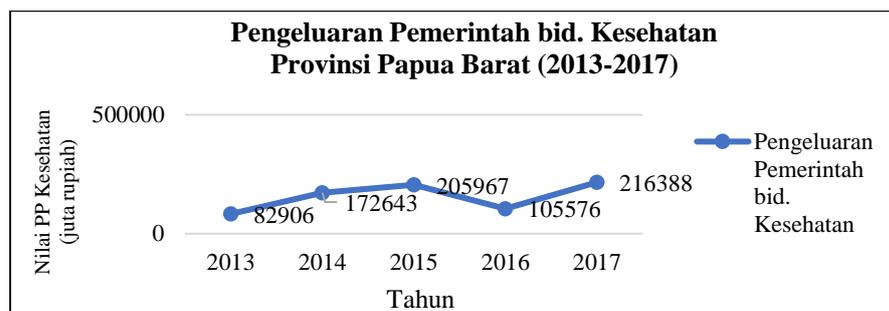
Gambar 4.3
PDRB Provinsi Papua Barat, 2013-2017

Menurut grafik diatas, dapat kita lihat bahwasanya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Papua Barat mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2013, nilai PDRB sebesar 53.354.410 juta rupiah; pada tahun 2014 sebesar 58.128.313 juta rupiah. Kemudian tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi 62.774.425 juta rupiah; pada tahun 2016 menjadi 66.433.080 juta rupiah; dan pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 71.481.899 juta rupiah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki peran yang esensial dalam keuangan suatu daerah, sebab dari PDRB dapat diketahui tentang karakteristik keuangan suatu daerah. Adapun juga dengan PDRB dapat menampilkan kesejahteraan suatu daerah tertentu, dengan kesejahteraan yang tinggi maka kapasitas hidup masyarakat dapat menjadi lebih baik (Hidayat, 2018).

D. Pengeluaran Pemerintah bidang Kesehatan

Kesehatan merupakan modal bagi manusia untuk dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, bahwa sistem kesehatan nasional diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya (Republik Indonesia, 2012). Pemerintah memiliki peran dalam mengalokasikan serta mendistribusikan dananya dalam bidang kesehatan agar dapat mengoptimalkan fungsi dari kesehatan suatu daerah. Sehingga, kesehatan di suatu daerah tersebut dapat menghasilkan penduduk yang lebih sehat baik secara fisik, mental, spiritual ataupun sosial demikian akan memungkinkan setiap individu untuk hidup dengan lebih produktif.



Sumber : *Kementerian Keuangan, 2013-2017 (data diolah)*

Gambar 4.4

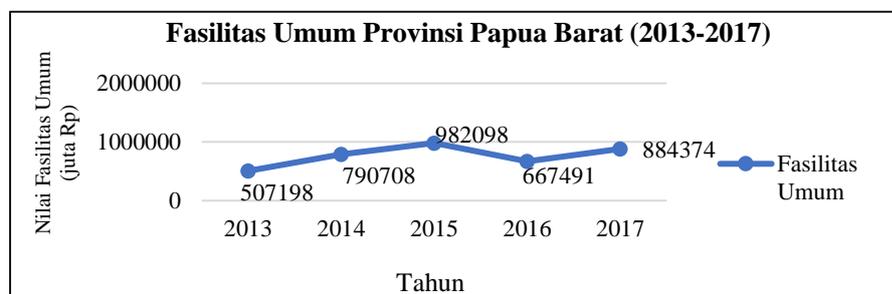
PP Kesehatan Provinsi Papua Barat, 2013-2017

Pada gambar 4.4 diatas, menunjukkan porsi pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan di Provinsi Papua Barat dari tahun 2013 sampai 2017. Pada tahun 2013 sebesar 82.906 juta rupiah, tahun 2014 mengalami

kenaikan menjadi 172.643 juta rupiah, kemudian tahun 2015 sebesar 205.967 juta rupiah. Namun, pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 105.576 juta rupiah, dan tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 216.388 juta rupiah. Peran pemerintah dalam hal ini upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sangat diperlukan agar terwujudnya masyarakat Indonesia yang sehat dan mampu hidup produktif secara sosial maupun ekonomis.

E. Fasilitas Umum

Sektor-sektor publik dijadikan prioritas bagi pemerintah dalam upaya mencapai pembangunan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan Manusia dapat terlihat dari pembangunan berbagai sarana, prasarana dan infrastruktur guna menunjang proses mobilitas penduduk yang tercermin dari tersedianya fasilitas umum. Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari aspek kesehatan dan pendidikan yang berkaitan dengan distribusi barang maupun jasa penunjang kesehatan dan pendidikan.



Sumber : *Kementerian Keuangan, 2013-2017 (data diolah)*

Gambar 4.5
PP Fasilitas Umum Provinsi Papua Barat, 2013-2017

Gambar 4.5 menunjukkan bahwa fasilitas umum di Papua Barat mengalami peningkatan secara berturut-turut selama dua tahun yaitu pada tahun 2013 sampai 2015 namun, pada tahun 2016 mengalami penurunan. Pada tahun 2013, fasilitas umum Provinsi Papua Barat sebesar 507.198 juta rupiah; pada tahun 2014 sebesar 790.708 juta rupiah; tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 982.098 juta rupiah; kemudian pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 667.491 juta rupiah; dan pada tahun 2017 menjadi sebesar 884.374 juta rupiah.